**Peran Financial Technologi dalam meningkatkan Inklusi Keuangan**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Indonesia pada kuartal I 2018 sebesar 5,06% lalu mengalami kenaikan pada kuartal II 2018 sebesar 5,27%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2018 juga lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya 2017 yang hanya sebesar 5,07%. Menurut data dari statisticstimes.com, pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada tahun 2018 sebesar 1.074,97 (angka dalam miliar US$). Angka ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-16 terbesar di dunia dan masuk kedalam negara G20. Yaitu kelompok 20 negara dengan perekonomian besar di dunia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur melalui indeks gini ratio juga mengalami penurunan. Menurut data dari BPS, gini ratio pada tahun 2018 sebesar 0,389, turun sebesar 0,002 dari tahun 2017 sebesar 0,391 dalam skala 0-1 (Gini ratio = 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang baik/sempurna, sebaliknya gini ratio = 1 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan). Hal ini membuktikan bahwa terjadi perbaikan terhadap pemerataan pendapatan masyarakat Indonesia.

Selain itu, sejalan dengan penurunan gini ratio, menurut data dari BPS penduduk di Indonesia pada Maret 2018 mengalami penurunan sebanyak 25, 95 juta jiwa atau berkurang sebesar 9,82% dibandingkan tahun 2017 sebesar 26, 58 juta jiwa.

Namun dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang saat ini mengalami pertumbuhan signifikan ditambah dengan adanya tren penurunan persentase masyarakat miskin, disisi lain pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dirasa masih lemah. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Indonesia berada di peringkat ke-116 di dunia, sedangkan Malaysia ke-67 dan Thailand ke-85. Selain itu masih terdapat kesenjangan ekonomi yang sangat besar antara masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan.

Untuk mengatasi tersebut dalam hal ini pemerintah harus merancang sebuah konsep strategi yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi adalah melalui sektor keuangan dengan menciptakan kebijakan keuangan inklusif. Keuangan inkusif sendiri merupakan pernyataan dimana orang dewasa memiliki akses terhadap kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan jasa keuangan resmi dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang dijelaskan oleh *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) :*

*“state in which all working age adults have effective access to credit, savings, payments, and insurance from formal service providers. Effective access involves convenient and responsible service delivery, at a cost affordable to the customer and sustainable for the provider, with the result that financially excluded customers use formal financial services rather than existing informal options.*” (CGAP-GPFI).

Secara garis besar, kebijakan keuangan inklusif yang pemerintah keluarkan merupakan suatu bentuk layanan keuangan yang lebih mendalam. Dimana layanan keuangan yang ada dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat bahkan oleh masyarakat kecil sekalipun (in the bottom of the pyramid).

Strategi keuangan inklusif juga merupakan gagasan yang di keluarkan oleh forum G20 dalam mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan ekonomi suatu negara. Beberapa literatur yang membahas mengenai penguatan sektor keuangan memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Khasnobis dan Mavrotas (2008) mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi.

Penerapan kebijakan keuangan inklusif di Indonesia sangat relevan dalam mendukung efektivitas dari fungsi dan tugas Bank Indonesia dari sisi moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial. Keuangan inklusif membantu menurunkan tekanan likuiditas dan rsiko kredit di sektor perbankan. Dengan adanya keuangan inklusif memungkinkan terbukanya pasar retail baru khususnya kredit mikro dan kecil sehingga membantu diversifikasi portofolio dan meminimalisasi risiko kredit.

Selain itu program keuangan inklusif juga dapat membantu dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat dan menumbuhkan responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Dengan adanya kebijakan keuangan inklusif, juga mampu meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang sudah ada sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Peranan perbankan menguasai industri keuangan di Indonesia dan diharapkan ikut membantu peningkatan kualitas layanan keuangan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga membuat bank dan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong peningkatan keuangan inklusif, melalui pengembangan *branchless banking* dan peningkatan financial literacy melalui sosialisasi.

Terlebih saat ini banyak bermunculan produk produk layanan keuangan digital yang kita kenal dengan fintech. Financial Technology atau yang biasa kita kenal dengan sebutan fintech yaitu sebuah inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern sebagai penghubung antara penyedia jasa finansial dengan pengguna atau masyarakat umum. Fintech secara umum merupakan industri baru di sektor ekonomi. Sebuah inovasi baru yang dikembangkan untuk menciptakan layanan keuangan atau perbankan menjadi lebih baik dan efisien karena memanfaatkan kehadiran teknologi.

Kemunculan fintech di Indonesia masih tergolong baru. Pada tahun 2006 - 2010 pelaku fintech hanya ada di angka 7%. Kemudian terus berkembang 6% pada tahun 2011 – 2012. Naik 9% pada tahun 2013 – 2014. Kemudian pada tahun 2015 dibentuk sebuah wadah untuk menghimpun para pelaku fintech yang bernama Asosiasi Fintech Indonesia (AFI). Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang terpercaya dan dapat diandalkan guna membangun ekosistem fintech di Indonesia. Kemunculan AFI mendorong perkembangan fintech. Pada tahun 2015 – 2016, perkembangan fintech naik sebesar 78%, tercatat 134 – 140 perusahaan. Dan pada tahun 2016 – 2017 meningkat sebesar 39% menjadi 188 – 196 perusahaan.

|  |
| --- |
|  |
| Gambar 1.3 Sumber: DailySocial.id Fntect Report 2016 |
|  |
| Gambar 1.4 Sumber: DailySocial.id Fintech Report 2017 |

Bisnis fintech Indonesia diyakini berkembang pesat dalam beberapa waktu mendatang. Pasalnya, nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2016 diestimasi sudah mencapai US$14,5 miliar, atau berkontribusi sebesar 0,6% dari transaksi global yang mencapai US$2,356 miliar. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga mencapai US$130 miliar di tahun 2020, dengan transaksi yang didominasi oleh e–commerce, marketplace, dan perusahaan fintech. Menurut Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa “Prospek pertumbuhan fintect di Indonesia cukup besar dan akan semakin progresif”.

Fintech sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari pengolahan aset, penggalangan dana (*crowd funding), e-money, p2p lending, payment gateway, remittance*, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Dan banyak perusahaan fintech yang sudah mulai terkenal, seperti kitabisa.com yang yang bergerak di bidang crowd funding, lalu modalku.com di bidang p2p lending, dan tentu saja perusahaan start up yang saat ini sedang banyak diperbincangkan di masyarakat seperti Gojek mengeluarkan Go-Pay. Bukalapak mengeluarkan Buka Dompet, dan masih banyak yang lainnya.

Kehadiran fintech diharapkan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan kemudahannya. Selain itu fintech juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusi keuangan. OJK mencatat bahwa saat ini perusahaan fintech yang ada di Indonesia dalam bentuk peer to peer lending sebanyak 150 perusahaan agar bisa ikut masuk dan berkontribusi dalam mensukseskan program inklusi keuangan. Selain itu, menurut Mantan Direktur Bank Sinarmas Freenyan Liwang, perusahaan fintech yang bergerak dalam bidang pembayaran atau pembiayaan UMKM menjadi bagian dari solusi dalam merealisasikan program pemerintah tentang inklusi keuangan.

Dukungan OJK terhadap fintech sejalan dengan program Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai negara “Digital Economy” terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 salah satunya melalui kebijakan inklusif keuangan yang diterbitkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Hingga saat ini kondisi akses keuangan di Indonesia dinilai masih rendah. Hal ini tercemin dari rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Survey terakhir yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2017 menunjukan inklusi keuangan Indonesia berada di angka 49%. Dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk dewasa Indonesia, hanya 49 orang yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal. Sedangkan pemerintah menargetkan inklusi keuangan Indonesia mencapai 75% di tahun 2019.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan 5 (lima) pilar penyangga SNKI. Pertama, Edukasi Keuangan. Kedua, Hak Properti Masyarakat yang sudah berjalan dalam bentuk program sertifikasi lahan. Kemudian ketiga, Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan. Keempat, Perlindungan Konsumen. Dan terakhir, Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintahan. Harapan pemerintah, dengan meningkatnya indeks inklusi keuangan Indonesia, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.

Keberadaan fintech memberikan dampak positif bagi industri layanan keuangan, karena mampu meningkatkan penetrasi pasar bagi lembaga keuangan. Dengan model bisnis penggunaan teknologi, efisiensi, kecepatan, peniadaan kendala konvensional seperti keadaan geografis dan waktu pelayanan yang dimiliki oleh fintech.

Sementara dari sisi masyarakat, fintech mempermudah akses berbagai informasi terkait berbagai jenis produk dan layanan keuangan. Selanjutnya masyarakat dapat memanfaatkannya untuk keperluan bisnis mereka mulai dari transaksi keuangan yang paling sederhana hingga pembiayaan bisnis. Hal ini akan sangat mendukung upaya penyebaran kekuatan ekonomi yang lebih adil dan merata untuk seluruh masyarakat, termasuk membuka penciptaan lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat.

Dengan adanya model bisnis seperti ini, maka seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan dengan lebih mudah melalui saluran-saluran pembiayaan khusus yang saat ini belum difasilitasi oleh institusi keuangan konvensional. Pada akhirnya industri fintech akan mampu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan, terutama masyarakat bottom of pyramid.

Rekening sendiri menurut Bank Dunia didefinisikan harus memiliki tiga fungsi utama, yaitu diantaranya “*saving, transfer, and payment*”. Termasuk juga di dalamnya terdaftar rekening uang elektronik maupun *mobile money* berbasis operator telekomunikasi.